

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.kompas.com
Media Cetak	

Tarif Integrasi Tiga Transportasi Sekitar Rp10.000

Penulis : Aisyah Sekar Ayu Maharani

Editor : Hilda B Alexander

Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal menyepakati usulan Pemprov DKI soal tarif integrasi tiga moda transportasi sebesar 10.000 rupiah untuk mendukung kemudahan mobilitas warga DKI, termasuk mempercepat pemulihan ekonomi. "Terkait nilai yang diajukan, 10.000 rupiah, dari hasil pendalaman sepertinya akan disepakati bersama," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, di Jakarta, Kamis (2/6).

Rencananya, Komisi V DPRD DKI akan rapat kembali dengan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD bidang transportasi umum. Tujuannya untuk membahas rekomendasi yang akan dikeluarkan DPRD, pekan depan. Adapun rencana menyepakati soal tarif integrasi 10.000 rupiah adalah salah satu isi rekomendasi Komisi B.

Apabila dalam rapat tersebut disepakati besaran tarif integrasi sebesar 10.000, maka diperkirakan APBD DKI akan meningkat. Meski begitu, dia menyakini penambahan besaran subsidi yang dibebankan ke APBD sudah dikalkulasi. "Pasti ada pembengkakan, tapi semua sudah dikalkulasi dan sebagai subsidi. Kendati ada kenaikan anggaran, tujuannya bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian," tutur dia.

Namun, Ismail belum bisa memastikan besaran persentase kenaikan subsidi yang kemungkinan akan muncul apabila usulan disetujui. Itu sedang dibahas. Nanti lebih jelas saat pembahasan di Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara karena angka baru akan terlihat secara signifikan.

Sebelumnya, dia memperkirakan besaran subsidi transportasi yang diberikan saat ini di DKI sebesar 4 triliun rupiah. Sementara itu, subsidi dikhawatirkan tidak tepat sasaran karena kemungkinan dinikmati oleh warga bukan dari DKI. Ini juga menjadi perhatian DPRD.

Meski begitu, menurut Ismail, Pemprov DKI sedang merumuskan kajian sehingga hasil dari formulasi itu memberikan manfaat yang tepat sasaran karena berbasis aplikasi berdasarkan akun pengguna atau *account base ticketing*. Artinya PSO atau subsidi yang diberikan memang tepat sasaran untuk warga DKI. Kuncinya adalah sistem mau diterapkan oleh DKI. Sistem itu disebut *account base ticketing*. "Itu aplikasi yang mau diterapkan," katanya.

Ismail menambahkan, selain bakal menyepakati usulan tarif integrasi sebesar 10.000, rekomendasi lainnya yang akan disampaikan dalam rapat pekan depan terkait perluasan manfaat bagi warga DKI Jakarta agar mendapat subsidi untuk tarif integrasi tersebut. Menurutnya, ada 16 atau 18 golongan penerima seperti KJP. Hal itu juga bisa mendapat manfaat yang sama sebagaimana mereka menggunakan TransJakarta. Jadi, bisa juga diterapkan di MRT, LRT, dan sebagainya.

Pelantikan

Sementara itu, kemarin dilaksanakan pelantikan anggota DPRD. Mereka adalah anggota Fraksi Gerindra, Rany Mauliani, dan anggota Fraksi PKS, Khoirudin. Keduanya dilantik sebagai Wakil DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. "Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semakin bisa bekerja maksimal dan terus bersama masyarakat," kata Rany.

Dia mengapresiasi M Taufik yang selama ini menjadi Wakil DPRD. Rany akan tetap berkoordinasi dengan Taufik. Sedang Khoirudin berjanji akan lebih maksimal melayani masyarakat. Dia juga berjanji akan mengawal kerja Gubernur DKI Jakarta. Rany sendiri menggantikan posisi Taufik dan Khoirudin menggantikan Suhaimi.

Redaktur : Aloysius Widiyatmaka

Penulis : Yohanes Abimanyu